

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Amirulah. (2015). *“Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian”*. Media Nusa Creative.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2017). *“Hukum Transaksi Elektronik”*. Nusa Media . Bandung.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum”*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. (2010). *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hernoko. (2014). *“Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial”*. Prenada, Jakarta.
- H S, Salim. (2021). *“Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)”*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- H.S, Salim. (2006). *“Hukum Kontrak Teori dan Tekhnik Penyusunan Kontrak”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Makarim. (2013). *“Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary”*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Miru. (2016). *“Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak”*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Miru. (2013). *“Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak”*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Nugroho, Sigit Spto. (2020). *“Metodologi Riset Hukum”*. Oase Pustaka. Jawa Tengah.
- Roesli, M, dkk. (2019). *“Asas kebebasan berkontrak”*.
- Salim HS, (2016). *“Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)”*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, (2013) *“Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio. (2009). *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*. Pradnya Paramita. Jakarta.

- Suharnoko. (2014). *"Hukum Perjanjian"*, Prenamedia, Jakarta.
- Syahrum, Muhammad. *"Pengantar metodologi penelitian hukumkajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis"*. Dotplus. Riau.
- Windari, Ratna Artha. (2014). *"Hukum Perjanjian"*. Graha Ilmu. Jakarta.

#### **ARTIKEL DALAM JURNAL**

- Savelyev, Alexander. "Contract law 2.0: Smart contracts as the beginning of the end of classic contract law." *Information & communications technology law* 26.2 (2017): 116-134..
- Azmi, M. U., dkk. (2023). Risiko Hukum Penggunaan Smart Contract pada Ethereum di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 235-242.
- Dona Budi dan Ishaniar Uwais. (2023). "Studi Komparasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Jepang". *Jurnal Lembaga penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)*. 143-147.
- Eulisa Safitri dan Ika Riswanti Putranti. (2019). "Kebijakan Melegalisasi Cryptocurrency Sebagai Upaya Pemerintah Jepang Mengamankan Keamanan Nasional Jepang". *Journal of International Relations*, 5(2), h. 278.
- Kesuma, D.A., (2018). KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 1(3), pp.19-26.
- Sutiarnoto, S., 2023. Risiko Hukum Penggunaan Smart Contract pada Ethereum di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, pp.235-242.
- Syahrani, R. (2010). *Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*, Cet. Ke-4, Cet. Ke-1, Alumni, Bandung.
- Szabo, N. (1996). Smart contracts: building blocks for digital markets. *EXTROPY: The Journal of Transhumanist Thought*, (16), 18(2), 28.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies is Changing the World*. Penguin

- Takeshi Nagase, et.al. (2022). "Blockchain and Cryptocurrency Laws and Regulations: Japan". Blockchain and Cryptocurrency Regulation 2022: Fourth Edition. Global Legal Insight, h. 336.
- Wardana, Yudistira Kusuma. "Analisis Aspek Hukum dan Implikasi Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Bisnis." Jurnal Sains Student Research 1.1 (2023): 776-786.
- Widyarani, K. D. P., Widiati, I. A. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum, 3(2), 300–305.
- Yudhi Amboro, et.al. (2019). "Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)". Journal of Judicial Review, 21 (2), h.
- Zulkepli, M.I.S.dkk,(2021).Konsep Kontrak Pintar Dan Potensinya Terhadap Transaksi Pembiayaan Berasaskan Tawarruq: Smart Contract Concept and Its Potential to Tawarruq-Based Financing Transactions. Jurnal Fiqh, 18(2), pp.345-376.

### **SKRIPSI**

- Dona Budi. (2013) Keabsahan Dan Landasan Kekuatan Mengikat Kontrak Elektronik Melalui Telemarketing Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Muthiah, Nasya Fajri. (2021) Kontrak Elektronik (E-Contract) pada Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Marfuah Sulaeman. (2022) Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Paylater, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

### **SUMBER INTERNET**

- Aditya Pratama, (2021), Sejarah danl Perkembangan Mata Uang Crypto, dimulai denganl kemuncuan Bitcoin, terdapat pada Sejarah dan Perkembangan Mata

Uang Crypto, Dimulai dengan Kemuncuan Bitcoin Diakses dari [inlews.id](http://inlews.id) pada tanggal 5 Juni 2024.

Badanl Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Diakses dari <http://kemendag.go.id> pada tanggal 4 April 2024.

Bambang Pratama, Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik, GET TO KNOW ELECTRONIC CONTRACTS, CLICK-WRAP AGREEMENTS AND ELECTRONIC SIGNATURES ([binus.ac.id](http://binus.ac.id)). Diakses dari <https://www.binus.ac.id> pada tanggal 9 Mei 2024.



## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

### **KUH Perdata**

Undang- undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama dan UU No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua Atas Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun. 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185).

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143)

Financial Instruments and Exchange Act (Act No. 25 of 1948) U.S. Congress. Securities Exchange Act of 1934.